

**PENGATURAN OJEK ONLINE SEBAGAI ANGKUTAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh

Ketut Anjaya Wilansa Wisna, Nim. 2214101014

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Ojek Online, Angkutan Umum, Kekosongan Hukum, Kepastian Hukum.

**REGULATION OF ONLINE OJEK AS PUBLIC TRANSPORTATION
BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC
AND TRANSPORTATION**

By

Ketut Anjaya Wilansa Wisna, Nim. 2214101014

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze the regulation of online motorcycle taxis (ojek online) as public transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation; and (2) examine and analyze the impact of the absence of such regulation on legal certainty for drivers and users of application-based transportation services. The type of research used is normative legal research with a descriptive nature. The data and sources of data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out through a literature study of statutory regulations, legal literature, and previous research. The data obtained were then analyzed qualitatively by examining the legal vacuum and its implications for legal protection. The results of the study indicate that (1) the regulation in Law Number 22 of 2009 has not explicitly recognized online motorcycle taxis as public transportation; and (2) the absence of such regulation has created a legal vacuum that weakens legal certainty and protection for drivers and consumers. Therefore, it is necessary to revise or establish new regulations that specifically govern online motorcycle taxis as public transportation in order to ensure legal certainty that is adaptive to technological developments and the needs of society.

Keywords: Online Motorcycle Taxi, Public Transportation, Legal Vacuum, Legal Certainty.